

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan global dan hubungan internasional antar negara di dunia. Adanya pandemi Covid-19 banyak negara yang harus menutup wilayahnya dari negara lain guna mempertahankan keamanan negaranya. Aktivitas transportasi dan hubungan bilateral maupun multilateral pun menjadi terganggu oleh adanya pandemi ini. Sejak kemunculannya pada Desember 2019, Virus ini langsung menjadi perhatian dunia. Sebab intensitas penyebarannya sangat masif dan mengakibatkan tingginya kematian di seluruh dunia (Fauzi, 2020).

Dengan adanya pandemi ini, negara di dunia mengalami perubahan khususnya politik global. Dinamika politik global saat ini berfokus pada upaya penanganan pandemi Covid-19. Sehingga pandemi Covid-19 bisa dijadikan sebagai babak baru dalam pergerakan politik global (Universitas Nasional, 2020). Pandemi Covid-19 membuat roda ekonomi di seluruh negara berdenyut lemah, tidak mengenal skala power yang melekat padanya, baik besar, menengah, ataupun kecil. Saat ini dunia tengah berhadapan dengan ancaman musuh yang sama dan tidak kasat mata, sehingga membuat protokol kesehatan pun harus diterapkan di setiap tempat, guna menciptakan ketahanan negara yang mapan, terutama ditujukan untuk melindungi warga negara yang merupakan salah satu elemen *power* yang signifikan. Banyak analisis yang mengemuka terkait dengan

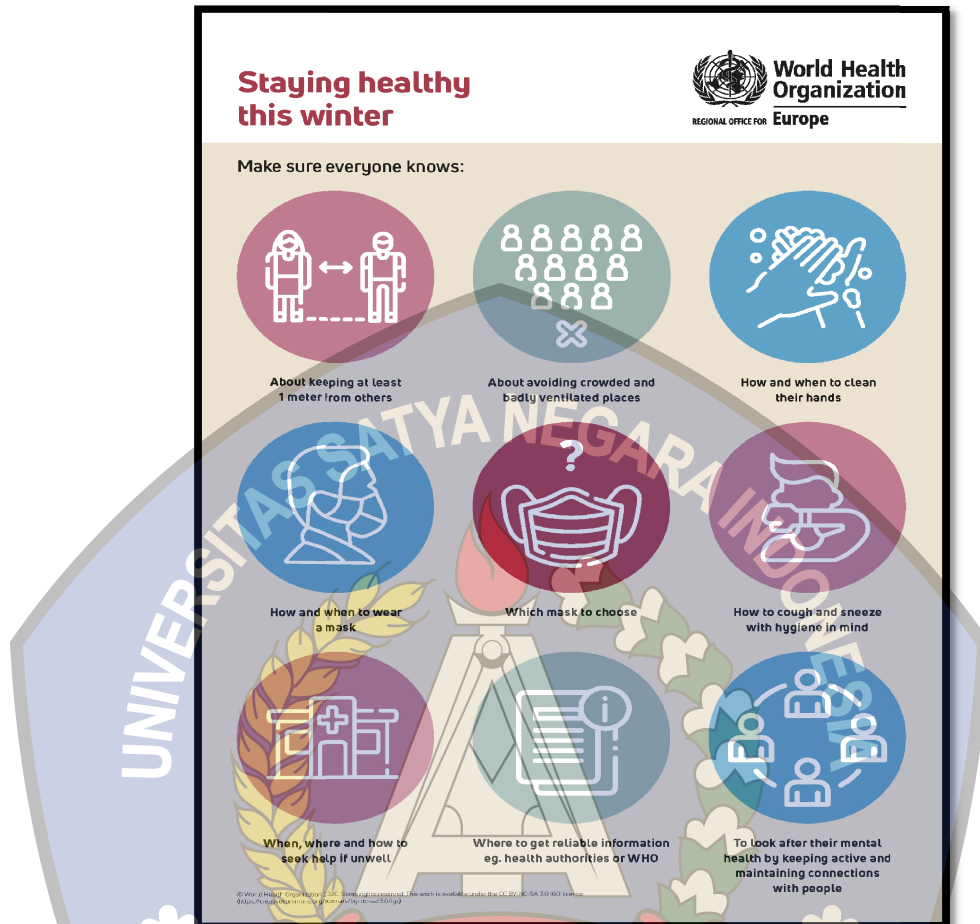
terjadinya pandemi Covid-19 ini, dimulai dari telaah bidang kesehatan, bahwa jenis penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan manusia ini bukanlah sebuah penyakit baru, namun berasal dari virus corona yang telah bermutasi dan menjadikan sifatnya semakin ganas dengan penularan yang cepat, terutama ketika mengenai manusia yang telah memiliki penyakit bawaan. Namun hal yang lebih penting untuk diperhatikan, bahwa isu pandemi penyakit juga memberikan dampak terhadap konstelasi politik internasional (Sushanti, 2020).

Dalam kasus pandemi Covid-19 yang telah menciptakan fenomena sekuritisasi di seluruh negara, Cina adalah aktor negara yang dianggap paling bertanggungjawab atas kondisi yang terjadi saat ini. Sebuah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa pandemi ini bermula atas wabah yang terjadi di Wuhan, Cina, ketika sebuah protokol kesehatan dianggap telah gagal diterapkan dalam laboratorium penelitian virus di negara tersebut (Kumar, 2020). Meskipun fakta telah berbicara, hal ini tidak lantas membuat Cina gentar dalam politik luar negerinya yang tampak ambisius, dan semakin nyata terlihat ketika pandemi ini merebak di seluruh dunia. Bahkan Uni Eropa dan Amerika Serikat dibuat kewalahan dengan kejadian pandemi yang telah banyak menyerap anggaran belanja negara. Sehingga tidak disangsikan, bagaimana negara-negara di kawasan selatan dunia yang sebagian besar adalah kategori negara berkembang berjuang untuk mengatasi persoalan ini, baik dari sisi ekonomi, sampai dengan kedaulatannya (Sushanti, 2020).

Seperti yang sedang terjadi sekarang, pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak negara berada dalam situasi krisis yang luar biasa. Selain karena sifat

pandemi yang tidak terduga, krisis ini juga diakibatkan penyebarannya yang sangat cepat meluas melintasi batas-batas wilayah dan negara. Upaya yang dilakukan oleh negara dalam situasi krisis seperti itu adalah pertama, menerapkan undang-undang darurat (*martial law*) dalam berbagai tingkatan sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, melakukan mitigasi dan kebijakan untuk mendorong upaya-upaya pencegahan. (Yanuarti, 2020).

*World Health Organization* atau WHO sebagai salah satu badan kesehatan dunia memberikan beberapa penanganan terkait wabah Covid-19 dengan tujuan yaitu menurunkan penyebaran Covid-19 dan mengurangi kematian karena Covid-19 (*World Health Organization*). WHO bersama pemerintah berupaya menangani pandemi Covid-19 dengan mempertimbangkan sisi kesehatan dan perekonomian secara bersamaan. Pendekatan protokol kesehatan tersebut, terbagi dalam dua kegiatan yakni 3M dan 3T. Untuk protokol kesehatan 3M ditujukan bagi aktivitas masyarakat, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sedangkan satu lagi yakni 3T, *testing, tracking, dan treatment* ditujukan untuk aktivitas kegiatan pemerintah (*World Health Organization*).



**Gambar 1.1** Himbuan Pencegahan Covid-19 dari WHO

Dalam menangani wabah Covid-19 ini, WHO merekomendasikan pertimbangan penting dalam menangani wabah Covid-19 ke beberapa negara yaitu, pertama kesehatan penduduk di dunia merupakan prioritas utama bagi kebijakan negara. Kedua, upaya mengurangi dampak ekonomi agar tidak diarahkan pada stimulus yang mendorong penyebaran covid, perlindungan sosial harus selalu jadi prinsip utama. Terakhir meningkatkan sistem kesehatan yang baik bagi setiap negara.

Wabah Covid-19 yang merubah tatanan internasional menjadikan berbagai negara di dunia melakukan berbagai penanganan yaitu dengan pendekatan *lockdown* dan *social distancing*. Pendekatan *lockdown* adalah melakukan karantina penuh atau penutupan akses di suatu wilayah, hal ini sebagaimana dilakukan Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, India dan Tiongkok dan umumnya negara-negara Eropa seperti Italia, Inggris, dan Jerman. Adapun *social distancing* lebih pada membatasi interaksi antar penduduk, di antara negara di dunia yang menerapkan model ini adalah Singapura, Korea Selatan dan Indonesia (Muzakir, 2020).

Politik internasional dalam hubungan internasional selama ini identik dengan peran laki-laki sebagai pemegang posisi penting dalam hubungan internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Ketika banyak perempuan terjun dalam ranah politik internasional, tugas tersebut tetap dilihat sebagai tugas seorang laki-laki. Asosiasi laki-laki dianggap lebih kuat dengan aktivitas-aktivitas membela negara dan mempertahankan kepentingan nasional. Setelah berakhirnya Perang Dunia II banyak muncul *International Organizations* dengan harapan dapat memberikan keamanan serta membawa perdamaian di dunia dan tentu untuk mencegah kedua perang seperti yang sebelumnya terjadi lagi. Salah satu organisasi yang muncul tepat saat berakhirnya Perang Dunia II adalah *The United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang salah satu programnya adalah *United Nations Women* (Ramadhan & Ma'sumah, 2018).

UN Women merupakan organisasi UN yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan ini tentu sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDG) yang kelima yaitu mencapai *Gender Equality* atau kesetaraan gender (UN Women *n.d*). Dalam mewujudkan tujuan ini, UN Women bekerjasama dengan pemerintah dan tentunya masyarakat sipil dalam merancang hukum, kebijakan, program, dan layanan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan dan anak-anak terakomodasi dengan baik di dalamnya dan partisipasi perempuan yang setara dengan semua aspek kehidupan (Ramadhan & Ma'sumah, 2018).

Maskulin dan Feminim adalah dua perilaku yang dapat dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan dan perilaku tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap gaya kepemimpinan yang akan diterapkan oleh setiap individu baik laki-laki maupun perempuan. Dalam pengambilan keputusan atau pembuatan sebuah kebijakan publik, perempuan dan laki-laki cenderung memiliki perbedaan dalam hal gaya kepemimpinannya. Hal ini dikarenakan perempuan dan laki-laki memiliki latar belakang dan cara pemikiran yang tidak sama. Perkembangan pemikiran bagi kaum perempuan dari tahun ketahun mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat semakin banyaknya kaum perempuan yang ikut dalam kanca politik maupun organisasi yang dapat mewakili kaum perempuan di berbagai negara.

Kepemimpinan perempuan menjadi isu publik yang selalu di perbincangkan. Peningkatan peran perempuan bukanlah tren apalagi fenomena baru seperti dikatakan sebagian orang. Perempuan sebagai kepala pemerintahan

telah ada sejak abad ke-15. Kepemimpinan perempuan mulai bangkit dari tidur panjang sejak isu hak asasi manusia dan persamaan gender secara lantang di suarakan oleh aktivis feminisme. Kiprah perempuan tersebut semakin menonjol pada abad ke-21. Di berbagai negara, sebagian besar perempuan mengalami perkembangan dalam berbagai sisi kehidupan atau mobilitas vertikal. Sudah banyak kaum perempuan yang dapat mengenyam dunia pendidikan yang sejajar dengan kaum laki-laki sehingga dapat menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan (Mewengkang, Mandey, & Ruru, 2014).

Kepemimpinan tidak ditentukan oleh faktor biologis, tetapi oleh di antaranya kemampuan dan skill. Karena itu, wanita yang mempunyai kemampuan kepemimpinan dan skill manajerial berhak menjadi pemimpin publik, meskipun secara biologis ia wanita. Sebaliknya, seorang pria yang tidak memiliki kecakapan memimpin ia tidak berhak menjadi pemimpin, meskipun secara biologis ia laki-laki. Pendapat ini dikuatkan oleh kenyataan banyak kaum wanita menempati jabatan-jabatan strategis di wilayah publik seperti manager perusahaan, menteri negara dan perdana menteri. Karena itu menggunakan argument tertentu untuk menolak kepemimpinan wanita tidak hanya kurang tepat secara realitas, tetapi juga secara sosiologis-historis (Wahyuni, 2016).

Sejumlah negara yang penanganan krisis Covid-19 dipimpin oleh seorang perempuan dinilai berhasil dan menunjukkan progress yang baik mulai dari Jerman, Selandia Baru, Denmark, hingga Taiwan. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern menjadi salah satu perempuan yang berpengaruh di dunia karena keberhasilannya dalam menanganan Covid-19 di negaranya. Selain itu, pemimpin

perempuan yang berpengaruh di dunia adalah Kanselir Angela Merkel dari Jerman. Merkel kabarnya sudah 10 tahun berturut-turut berada di peringkat 1 perempuan paling berpengaruh di dunia versi Forbes. Angela Merkel menjadi Kanselir Jerman sejak 2005, dan dinobatkan sebagai Kanselir perempuan pertama di Jerman. Selain itu, Merkel juga dinobatkan sebagai kanselir dengan jabatan terlama sepanjang sejarah Jerman modern (Kumparan *Women News*, 2020). Dalam menangani pandemic Covid-19 di Jerman, Merkel membuat berbagai regulasi kebijakan mengenai penanganan dan pencegahan Covid-19 di Jerman.

Dalam realitas politik dewasa ini, di seluruh dunia, persoalan eksistensi dan keterwakilan perempuan didalam proses pembuatan kebijakan adalah hal yang penting politik dinormalkan secara luas untuk mampu melibatkan peran dan partisipasi perempuan pada proses didalamnya (soeseno, 2011). Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan analisis kepemimpinan perempuan dalam menangani wabah Covid-19 di Taiwan, Jerman, dan Selandia Baru sebagai salah satu implikasi gender dalam dunia internasional.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Fenomena wabah Covid-19 yang menyerang hampir seluruh negara di dunia mengubah tatanan politik internasional dan sistem internasional. Berbagai negara didunia memfokuskan diri dalam pengendalian dan pencegahan wabah tersebut meluas di negara melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Dalam menangani Covid-19 tersebut, banyak pemimpin perempuan yang dianggap berhasil dalam memberikan kontribusi pencegahan Covid-19 di negaranya. Berakar dari uraian tersebut maka, pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam



penelitian ini adalah bagaimana Keberhasilan kepemimpinan perempuan dalam menangani wabah Covid-19 di Taiwan, Jerman, dan Selandia Baru?

### **1.3 Batasan Penelitian**

Disini penulis membatasi masalah yang akan dibahas agar tidak meluas dalam pembahasannya dengan menjadikan analisis kepemimpinan perempuan dalam menangani wabah Covid-19 di Taiwan, Jerman, dan Selandia Baru sebagai fokus penelitian. Penulis menggunakan teori gender feminisme dalam menganalisa fenomena tersebut.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana analisis kepemimpinan perempuan dalam menangani wabah Covid-19 di Taiwan, Jerman, dan Selandia Baru. Tulisan ini disusun berdasarkan teori Feminisme dalam melihat bagaimana peran perempuan dalam isu internasional.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dibagi atas dua hal yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut:

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan kontribusi keilmuan studi hubungan internasional terkait feminisme

2. Untuk memahami bagaimana fenomena perempuan dalam penanganan Covid-19
3. Untuk dijadikan rekomendasi dan pertimbangan pembuatan kebijakan yang bersumber dari peneliti yang berkaitan langsung dengan kajian ilmu hubungan internasional maupun ilmu-ilmu lainnya

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis dalam penelitian ini Penulis berharap penelitian ini adalah:

1. Sebagai gambaran mengenai pembuatan kebijakan bagi para pemerintah dan pemangku kebijakan dalam penanganan Covid-19
2. Sebagai rekomendasi bagi negara-negara di dunia.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terbagi kedalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti.

### **BabI: Pendahuluan**

Bab I berisi mengenai judul yang diambil, latar belakang masalah yang berkaitan dengan judul, yang juga berisi beberapa pemaparan secara umum mengenai informasi tentang latar belakang Covid-19 dan bagaimana

perempuan menjadi figus pemimpin, Pertanyaan Penelitian, Batasan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Bab II berisi tentang Tinjauan Pustaka yang berisi mengenai Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Landasan Konseptual dan Alur Pemilikan.

## **Bab III: Metodologi Penelitian**

Bab III berisi mengenai Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Unit Analisis, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Keabsahan Data.

## **Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab IV berisi mengenai analisis kepemimpinan perempuan di Taiwan, Jerman, dan Swedia

## **Bab V: Penutup**

Bab V berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian ini secara singkat, padat dan jelas. Selain berisi kesimpulan, bab ini juga berisi saran dari penulis yang diperuntukkan sebagai bahan acuan untuk penulis lain.